

PROGRAM PADAT KARYA KABUPATEN BANTUL

Metode Pengembangan Infrastruktur Berbasis Pedesaan

BANTUL (KR)-Pemerintah Kabupaten Bantul dibawah kepemimpinan H Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo punya komitmen mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, berbagai upaya dan program dijalankan untuk meningkatkan sarana prasarana infrastruktur di padukuhan. Dari tahun ke tahun gelontoran anggaran terus mengalami peningkatan. Bahkan tahun 2024 ini, Pemkab Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul mengulirkan program padat karya mencapai 526 titik tersebar di Kabupaten Bantul. Terakhir pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan kegiatan padat karya pengembangan potensi desa Dana Keistimewaan DIY digelar di Dusun Dusun Nogosari II Wukirsari Imogiri Bantul awal pekan ini.

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih mengatakan, program padat karya dari pemerintah DIY dengan sumber anggaran dana Keistimewaan atau Danais sangat bermanfaat bagi masyarakat. "Kegiatan padat karya ini ada alokasikan upah untuk yang bekerja menggarap padat karya itu manfaat pertama. Manfaat kedua terjadi peningkatan infrastruktur di pedesaan dan terbangun jalan cor blok, talut hingga jaringan irigasi. Semua itu untuk memperbaiki sarana mobilitas barang dan jasa. Dengan demikian, padat karya tersebut memiliki manfaat ganda, maksudnya untuk peningkatan ekonomi baik secara langsung berupa upah maupun tidak langsung berupa perbaikan sarana prasarana," ujar Halim.

Dijelaskan, tahun 2024 ini terdapat 526 titik padat karya dijalankan. "Angka tersebut sebuah jumlah sangat banyak yang tidak terjadi sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 176 titik itu dari APBD Kabupaten Bantul. Sisanya dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk yang dibiayai oleh Dana keistimewaan contohnya hari ini, kegiatan padat karya pengembangan potensi desa ini dibiayai dana keistimewaan DIY," ujar Halim.

Dijelaskan, pemerintah menempatkan padat karya ini sebagai salah satu metode pengembangan infrastruktur pedesaan. Karena memiliki manfaat ganda, dari hasil evaluasi Dinas Tenaga Kerja, terjadi peningkatan kualitas. Masyarakat membangun sendiri tentu hasilnya lebih baik dibandingkan jika dikerjakan pihak ke-

tiga. "Jadi pemerintah semakin yakin dan percaya bahwa padat karya ini adalah salah satu cara untuk menanggulangi masalah ekonomi dan menyediakan ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang tumbuhnya ekonomi," ujar Halim.

Selain itu kata Halim, sekarang ini banyak program pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan. Termasuk adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK), mekanismenya dana ditransfer dari daerah kabupaten Bantul ke kas keuangan desa. Ada juga program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P2MK). Hal tersebut merupakan bantuan keuangan dari kabupaten ke desa. Termasuk Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Padukuhan (P2BMP). "Dalam program tersebut, masing-masing padukuhan dialokasikan Rp 50 juta kali 933 padukuhan se-kabupaten Bantul itu jumlahnya ada 46,6 miliar," jelas Halim.

Selain itu, masih ada Dana Insentif Kalurahan (Dikal) untuk memberikan penghargaan kepada kelurahan-kalurahan berkinerja baik. "Masih banyak fasilitasi-fasilitas dari dinas-dinas, terutama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang mengelola TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) "Ini semuanya sasarannya ke desa, ke kampung-kampung, dusun-dusun. Ini penting karena kita ingin desa-desa, kampung-kampung kita menjadi pusat pertumbuhan baru untuk ekonomi. Maka kita mencanangkan padat karya sebagai motor pengembangan potensi desa sesuai dengan cita-cita kita. Bahwa pemerintah Kabupaten Bantul itu punya cita-cita atau misi-misi ketiga bunyinya pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi inklusif," jelas.

Pertumbuhan ekonomi inklusif artinya supaya ekonomi tumbuh merakyat. "Yang tumbuh ora wong bos-bos tok, tapi yang dibawah itu juga tumbuh. Terus carane kepriye carane itu, kita bangun infrastruktur sarana prasarana ekonomi. Ketika sarana prasarana tersedia pengembangan ekonomi lebih mudah. Pengembangan ekonomi niku ora iso lepas dari sarana prasarana," kata Halim. Dijelaskan, anggaran Kabupaten Bantul dan anggaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu fokusnya untuk ngembangke ekonomi kalurahan-kalurahan agar cepat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo mengatakan, bahwa padat karya merupakan program unggulan yang sudah semestinya dilanjutkan. Karena letak geografis Kabupaten Bantul memang sangat sesuai dengan kegiatan padat karya. Joko Purnomo mengatakan, bahwa padat karya mesti digelorkan dengan berbagai keunggulan serta punya manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Dijelaskan, ketika program pembangunan dengan skema padat karya. Masyarakat bisa menentukan skala prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil dilapangan. Karena masyarakat sebelum menentukan rencana pembangunan di d a h u l u i d e n g a n m u s y a w a r a h d u s u n . Dengan

demikian, pembangunan dengan model padat karya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Dari proses awal sudah kelihatan, bahwa rakyat sudah melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, apakah cor blok, jaringan irigasi atau talut," ujarnya.

Joko mengatakan, program padat karya juga dikerjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat. Sehingga dari aspek kualitas bisa terjamin. Selain itu, ada upah untuk tukang dan juga tenaganya. Kondisi tersebut sudah pasti dirasakan masyarakat penerima program secara langsung. Dari sisi jumlah tenaga kerja, ada ribuan pekerja ikut berpartisipasi dari kegiatan tersebut. Pihaknya merasa bersyukur, dalam proses membangun Bantul yang harmonis sejahtera berkeadilan salah satunya lewat program padat karya.

"Saya berharap dengan program padat karya ini, mampu berkontribusi dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Salah satunya kita semua berharap bisa membantu bangkitnya sektor perekonomian berbasis masyarakat.

Karena diakui atau tidak, program ini betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga bisa melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. (Roy)



H. ABDUL HALIM MUSLIH
BUPATI BANTUL



JOKO BUDI PURNOMO
WAKIL BUPATI BANTUL

SMPN 1 Srandakan Deklarasi Anti Kekerasan

BANTUL (KR) - SMP N 1 Srandakan menggelar upacara pembukaan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) mengawali tahun ajaran 2024/2025, sekaligus dilanjutkan deklarasi anti kekerasan dan perundungan, Senin (15/7). Secara resmi Kegiatan

MPLS dibuka oleh Kepala SMPN 1 Srandakan, Mide Payama SPd, ditandai dengan pengalungan kartu nama MPLS kepada perwakilan peserta didik baru dan diikuti peserta didik lainnya. Mide Payama mengatakan, MPLS yang dilaksanakan mulai Senin

(15/7) hingga Rabu (17/7) membantu peserta didik beradaptasi dengan suasana lingkungan belajar yang baru dengan suasana kegiatan yang ceria dan menyenangkan, tanpa ada perploncon, senioritas, dan penugasan-penugasan yang irasional. Upacara dilanjutkan

dengan deklarasi anti kekerasan dan perundungan dengan dibaca secara bersama-sama seluruh peserta upacara 10 poin pernyataan deklarasi untuk saling menghargai dan menghormati segala perbedaan, menjaga diri dari segala bentuk perundungan, kekerasan, dan

kejahatan baik fisik maupun verbal. Deklarasi diakhiri dengan tanda tangan bersama sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama yang terdiri dari Panewu, Kapolsek, Danramil, Puskesmas, KUA, guru karyawan, wakil orangtua/wali siswa dan perwakilan

siswa sendiri. Panewu Srandakan, Sarjiman SIP MPi, selaku pembina upacara menyampaikan pesan kepada semua siswa untuk melanjutkan prestasinya yang pernah diraih oleh kakak kelas sebelumnya yang salah satu siswa berhasil meraih nilai ASPD tertinggi

se-Kabupaten Bantul di tahun 2024 ini, dan seharusnya bersyukur bisa punya kesempatan sekolah di SMPN 1 Srandakan yang sudah menjadi sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka dan menerapkan pembelajaran menyenangkan, nyaman, aman dan ramah anak. (Jdm)-f